

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu pemerintahan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat apabila memberikan kebijakan serta pelayanan yang terbaik. Selain itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dengan baik dan menancapkan disiplin hukum dianggap dalam pemerintahan yang baik (Adrilina et al.,2018). Dalam pemerintahan transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas merupakan tiga ciri pemerintahan yang baik.

Akuntansi dalam hal ini berperan sebagai informasi keuangan yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan ekonomi. Akuntansi berperan penting dalam proses berjalannya pemerintahan. Akibat dari semakin bertambahnya kegiatan perekonomian dan pertumbuhan teknologi informasi yang pesat maka dibutuhkan sebuah sistem untuk menyelesaikan urusan keuangan itu sendiri. Sistem pengelolaan keuangan dapat dianggap sebagai sub-sistem dari sistem pemerintahan di dalam ruang lingkup sistem pemerintahan.

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah metode pencatatan semua transaksi pengeluaran kas. Pengelolaan pengeluaran kas adalah seperangkat tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, pengarsipan, dan pertanggungjawaban pengeluaran uang. Pengelolaan ini dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan ini haruslah dilakukan sesuai dengan

peraturan yang ada serta dilakukan secara efektif, efisien dan tepat. Sehingga diharapkan akan mempermudah kegiatan pengelolaan keuangan suatu daerah (Raja,2016).

Administrasi keuangan daerah dalam hal ini berperan sebagai satu dari sekian banyak komponen pengelolaan dan penting bagi keseluruhan pengelolaan keuangan. Keuangan daerah yang dimaksud meliputi segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan harus dikelola sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah perlu adanya transparansi antara pemerintah daerah kepada masyarakat untuk bisa mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan daerah tersebut. Masyarakat merupakan partisipan penting yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang tepat baik secara langsung ataupun tidak. Dalam pengambilan kebijakan ini harus melewati organisasi yang ditugaskan dengan memiliki kapabilitas untuk mencetuskan ambisi dan gagasannya secara legal.

Selain itu, akuntabilitas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pemerintahan yang baik pula. Hal ini dilakukan dengan cara mempertanggungjawabkan setiap kebijakan terhadap publik yang dilaksanakan. Hal ini bisa diterapkan apabila uang persediaan habis, bendahara pengeluaran dapat mengajukan Penggantian Uang atas penggunaan uang persediaan yang telah disetujui untuk jangka waktu tertentu. Ganti Uang

disini dapat diajukan untuk satu kegiatan atau banyak kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku (Adrilina et al.,2018).

Dalam sebuah instansi pemerintahan Bendahara Pengeluaran lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan penggunaan anggaran dana secara rutin pada awal tahun anggaran selepas penerbitan Keputusan Kepala Daerah mengenai Besaran Uang Persediaan. Jika di tengah periode terdapat kekurangan dalam Uang Persediaan, maka Bendahara Pengeluaran memiliki otoritas untuk mengajukan Ganti Uang sebesar penggunaan Uang Persediaan yang telah diberikan untuk jangka waktu tertentu (Adrilina et al.,2018).

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai literatur dan prosedur mengenai bagaimana tantangan sewaktu-waktu berkembang dalam pelaksanaan sistem pada aplikasi Satria Keuangan terhadap prosedur ganti uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi Prosedur *Reimbursement* atau Ganti Uang Melalui Sistem Aplikasi Satria Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

## **B. Perumusan masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana prosedur *Reimbursement* atau GU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui efisiensi prosedur *Reimbursement* atau GU Persediaan melalui sistem aplikasi Satria Keuangan.

### C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

#### 1. Maksud Praktik Kerja Lapangan antara lain:

- 1) Mempelajari prosedur ganti uang menggunakan sistem Aplikasi Satria Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- 2) Sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Akuntansi Diploma III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

#### 2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan antara lain :

- 1) Bertujuan agar penulis berkesempatan mendapatkan wawasan baru di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas baik wawasan mengenai kebijakan keuangan yang berlaku maupun ilmu pengetahuan lainnya.
- 2) Bertujuan agar penulis dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan dan mengasah kemampuan dalam bidang keuangan yang sebelumnya dipelajari di dalam dunia perkuliahan.

#### 3. Manfaat PKL

##### a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan informasi mengenai kegiatan keuangan khususnya prosedur ganti uang yang dapat diperuntukan penyusunan tugas akhir
- 2) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengetahui tugas atau pekerjaan yang dilakukan dalam dunia kerja khususnya dalam instansi pemerintahan.

- 3) Menambah wawasan yang sebelumnya belum diketahui penulis serta menambah relasi yang dapat sangat membantu.
  - 4) Menjadi sarana penulis untuk menerapkan teori-teori mengenai keuangan yang sebelumnya dipelajari di dunia perkuliahan.
- b. Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- 1) Bermanfaat sebagai sarana memperkenalkan eksistensi Program Studi Akuntansi D3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ke dunia luar.
  - 2) Bermanfaat menjadi tolak ukur sekaligus evaluasi terhadap kurikulum yang diterapkan.
  - 3) Bermanfaat untuk melihat menambah referensi bacaan dari hasil penyusunan tugas akhir mahasiswa.
- c. Manfaat Bagi Instansi Praktik Kerja Lapangan
- 1) Memperkenalkan instansi kepada mahasiswa agar mengetahui pekerjaan yang ada di instansi tersebut
  - 2) Mendapatkan tenaga kerja tambahan untuk sementara waktu.

#### **D. Pembatasan masalah**

Pembahasan masalah yang akan diangkat penulis adalah prosedur ganti uang menggunakan sistem aplikasi satria keuangan, maka pembatasan masalah hanya akan sampai pada hal tersebut. Hal ini karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menerapkan beberapa metode dalam mengumpulkan data, metode tersebut antara lain:

### 1. Data Primer

#### a. Metode Wawancara

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara yaitu metode untuk memperoleh informasi secara langsung melalui tanya jawab kepada pihak yang memiliki wewenang bertanggung jawab. Dalam hal ini penulis bertanya kepada sub koordinator bidang Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi, penanggung jawab penulis selama melaksanakan kegiatan PKL, serta staf bidang Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal-hal yang ditanyakan merupakan informasi yang menyangkut Prosedur *Reimbursement* atau GU Menggunakan Sistem Aplikasi Satria Keuangan.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati serta memahami informasi-informasi dari laporan-laporan mengenai *Reimbursement* atau GU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Selain itu penulis juga secara melakukan pengamatan terhadap prosedur *Reimbursement* atau GU Menggunakan Sistem Aplikasi Satria Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

### 2. Data Sekunder

a. Dokumentasi

Penulis mendapatkan data tambahan pendukung penulisan laporan akhir mengenai Analisis Sistem Aplikasi Satria Keuangan terhadap Prosedur *Reimbursement* atau GU di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dokumentasi ini diambil dari arsip Surat Pertanggungjawaban dan kegiatan penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

b. Studi Pustaka

Penulis mendapatkan data tambahan dari referensi-referensi yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan dan Analisis Sistem Aplikasi Satria Keuangan terhadap Prosedur *Reimbursement* atau GU.

## **F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Tahap Persiapan**

Di tahap pertama ini kegiatan yang dilakukan penulis adalah mencari tempat instansi yang akan dijadikan tempat praktik kerja lapangan. Setelah menentukan instansi mana saja yang akan dituju, penulis kemudian mengurus perizinan. Perizinan yang pertama dilakukan adalah membuat surat permohonan izin praktik kerja lapangan yang dibuat oleh fakultas. Setelah surat izin dari fakultas keluar kemudian penulis mendatangi tempat praktik yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Penulis menyerahkan surat izin Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 10 Januari 2022.

Kemudian satu minggu setelah menyerahkan surat izin PKL tersebut penulis melakukan *follow up* ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tepatnya tanggal 17 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 penulis mendapatkan surat konfirmasi bahwasannya penulis diperbolehkan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tanggal 1 Maret sampai dengan 8 April 2022.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan :

Tempat Kerja Praktik : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Waktu Pelaksanaan : 1 Maret – 8 April 2022

### Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin - Kamis	07:15 - 15:30	12:00 - 13:00
Jum'at	07:15 - 15:15	12:00 - 13:00

Tabel 1. 1 Jadwal PKL hari biasa

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin - Kamis	07:30 - 15:00	12:00 - 13:00
Jum'at	07:30 - 11:00	-

Tabel 1. 2 Jadwal PKL bulan Ramadhan

Pada tanggal 1 Maret 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tepatnya di bidang Sumber Daya Kesehatan. Pada hari pertama penulis menemui pembimbing lapangan dan diberi arahan pekerjaan-pekerjaan yang bisa

dilakukan. Pada minggu pertama belum banyak pekerjaan dan masih dalam proses adaptasi. Minggu kedua dan seterusnya penulis mulai aktif melakukan berbagai tugas yang diberikan. Pada minggu kelima melakukan observasi mengenai Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kemudian minggu keenam dan ketujuh melakukan wawancara kepada Sub Koordinator Seksi Sumber Daya Masyarakat Kesehatan dan Sistem Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan. Selain itu dilakukan wawancara dengan staf bidang Keuangan mengenai prosedur *Reimbursement* atau GU.

### 3. Tahap Pelaporan

Tahap terakhir dalam Praktik Kerja Lapangan adalah tahap pelaporan. Setelah melaksanakan PKL pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022. Hal yang dilakukan adalah mengajukan topik pembahasan yang dilanjut dengan pengajuan judul Laporan Tugas Akhir. Setelah disetujui kemudian penulis menyusun Laporan Tugas Akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing.